



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DJKA
Membangun
Perkeretaapian
Nasional

2026 RENCANA KERJA TAHUNAN

Direktorat Prasarana Perkeretaapian



 ditpraska

 djka.dephub.go.id/prasaranaka





KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 disusun sebagai rencana kinerja tahun kedua dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2026.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang.

Jakarta, 30 Juni 2025

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T., QGIA.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196507031991032001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
PENDAHULUAN	3
1.1. DASAR HUKUM.....	3
1.2. LATAR BELAKANG	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	6
CAPAIAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN. 10	
2.1. PAGU DAN REALISASI KEUANGAN	10
2.2. CAPAIAN PEMBANGUNAN	10
2.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	14
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	21
3.1. VISI MISI DAN TUJUAN	21
3.1.1. VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.....	21
3.1.2. VISI DAN MISI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN ...	23
3.1.3. TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	25
3.1.4. TUJUAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	25
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA	26
3.2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.....	26
3.2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	40
3.3. TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	46
TARGET KINERJA TAHUNAN	49
4.1. TARGET INDIKATOR KINERJA/PROGRAM RENCANA KINERJA 2026	49
PENUTUP	52



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

DJKA
Membangun
Perkeretaapian
Nasional

PENDAHULUAN

 **ditpraska**

 **djka.dephub.go.id/prasaranaka**





PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana dan perubahanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dan perubahanya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



1.2. LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Dengan berpedoman pada Konsep Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025-2029 Bidang Prasarana Perkeretaapian, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 yang merumuskan indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2026.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 memuat tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2026 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2026.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menetapkan rencana target pada indikator – indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolak ukur kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang akan dicapai tahun 2026.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 – 2029 Bidang Prasarana Perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan menjadi salah satu komponen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di setiap unit kerja dalam Lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.4. ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 4 tahun 2025 tentang Organisasi



dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang didalamnya terdapat unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara legalitas kedudukannya dibawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

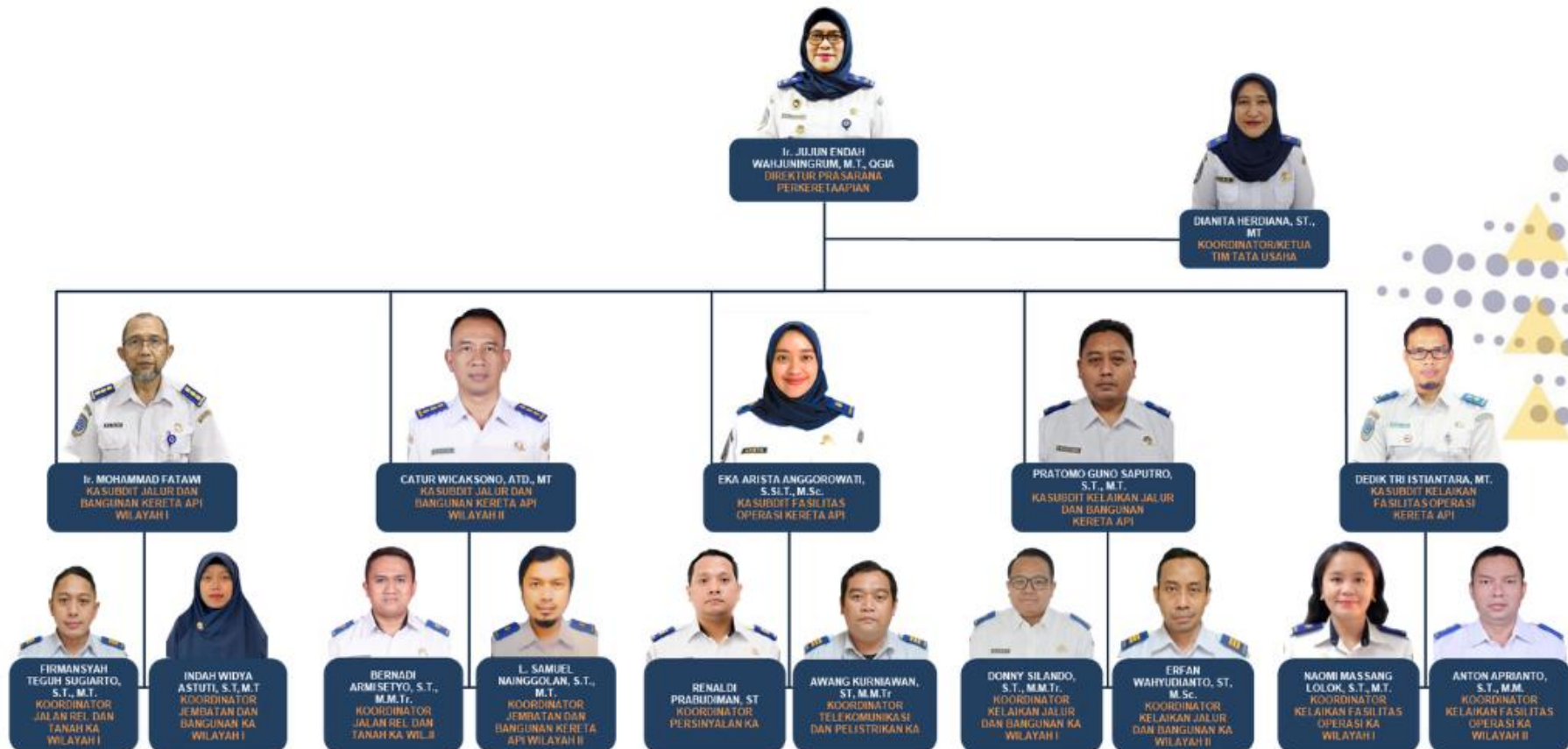
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;



- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

DJKA
Membangun
Perkeretaapian
Nasional

CAPAIAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

 **ditpraska**

 **djka.dephub.go.id/prasaranaka**





CAPAIAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

2.1. PAGU DAN REALISASI KEUANGAN

Daftar pagu dan realisasi belanja Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian tahun 2020-2024 :

Tabel 2.1. Pagu dan Realisasi Belanja Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian tahun 2020-2024

Tahun	Pagu	Realisasi	Tingkat Penyerapan Anggaran
2020	Rp 1.805.920.688.000	Rp 1.796.758.731.467	99%
2021	Rp 2.781.544.517.000	Rp 2.732.158.885.770	98%
2022	Rp 1.403.753.931.000	Rp 1.402.917.373.906	100%
2023	Rp 1.191.375.766.000	Rp 1.073.627.415.428	90%
2024	Rp 751.163.816.000	Rp 528.708.841.476	70%

Dapat disampaikan bahwa rata-rata Tingkat penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 92%.

2.2. CAPAIAN PEMBANGUNAN

Di dalam RPJMN 2020-2024 disampaikan 5 (lima) arahan utama Presiden yang digunakan sebagai strategi melaksanakan misi Presiden yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Arahan tersebut meliputi (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; dan (5). Transformasi Ekonomi.

Visi, misi dan lima arahan Presiden diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024. Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu pada Agenda Pembangunan 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan



Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional melalui:

1) Pembangunan Infrastruktur Dasar

Dalam pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar terdapat 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan terdapat 1 (satu) Proyek Prioritas (ProP) yaitu Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dengan Indikator yang digunakan adalah rasio kejadian kecelakaan kereta api per 1 juta perjalanan kereta api (rasio) dengan capaian tahun 2024 triwulan II sebesar 0,09 dan sudah memenuhi target 2024 sebesar 0,23.

Tabel 2.2. Capaian Pembangunan Infrastruktur Dasar Tahun 2024

Indikator	Target	Capaian (s.d TW. II)
Rasio kejadian kecelakaan kereta api per 1 juta perjalanan kereta api	0,23	0,09

2) Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

Dalam pembangunan Infrastruktur Ekonomi terdapat 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Konektivitas Kereta Api dan terdapat 4 (empat) Proyek Prioritas (ProP) yaitu: (1) Pembangunan Jalur KA Antar Kota; (2) Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api; (3) Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara; (4) Penyediaan PSO dan Subsidi. Indikator yang digunakan adalah: (1) Panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km); (2) Persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori 1 dan 2; (3) Jumlah simpul transportasi yang terhubung kereta api. Capaian tahun 2024 triwulan II indikator panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km) sepanjang 6.927 km (belum memenuhi target 2024 sepanjang 7.451 km, capaian indikator persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori 1 dan 2 adalah 94% (sudah memenuhi target 2024 sebesar 94%) dan capaian indikator jumlah simpul



transportasi yang terhubung kereta api sudah 4 simpul transportasi (belum memenuhi target 2024 yaitu 8 simpul transportasi).

Tabel 2.3. Capaian Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Tahun 2024

Indikator	Target	Capaian
Panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km)	7.451 km	6.944,994 km
Persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori 1 dan 2	94%	95,02 %

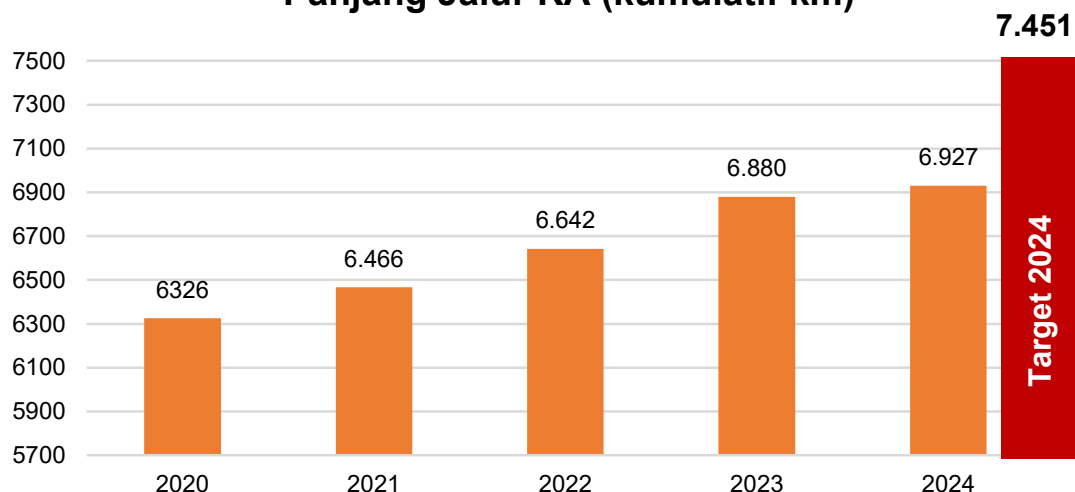
3) Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Dalam pembangunan Infrastruktur Perkotaan terdapat 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Transportasi Perkotaan dan terdapat 2 (dua) Proyek Prioritas (ProP) yaitu Pengembangan SAUM perkotaan di 6 wilayah metropolitan dan Pengembangan SAUM perkotaan besar lainnya.

Tabel 2.4. Capaian Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2024

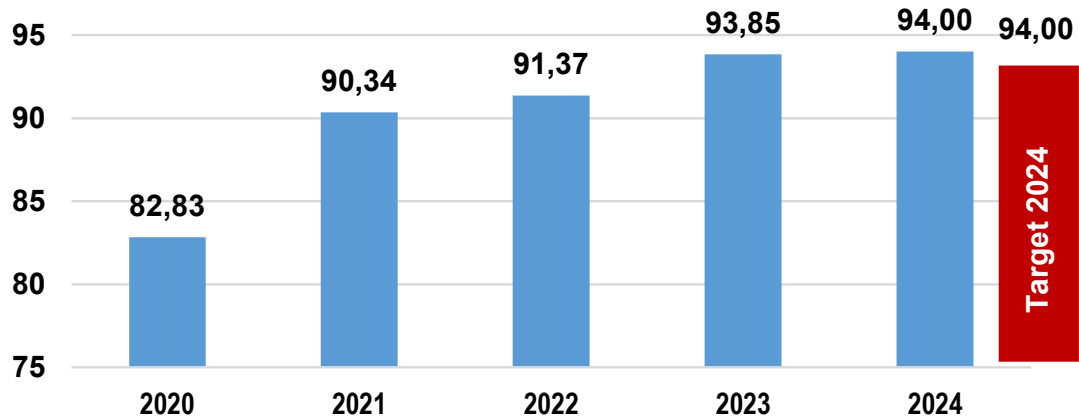
Indikator	Target	Capaian
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel	6 perkotaan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar)	4 perkotaan (Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan)

Panjang Jalur KA (kumulatif km)





Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2



Jumlah Kota Metropolitan dengan Sistem Angkutan Massal Perkotaan



Gambar 2.1. Evaluasi Capaian RPJMN tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

Pada periode tahun 2020 – 2024, telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 728,148 Km, peningkatan / rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi/ keandalannya sepanjang 1.187,52 Km, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.5. Capaian Pembangunan Prasarana Perkeretaapian tahun 2020-2024

URAIAN	SATUAN	TAHUN					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pembangunan Jalur KA Termasuk Jalur Ganda dan Reaktivasi	Km'sp	104,218	43,14	176,12	372,67	32	728,148
Peningkatan dan Perawatan/Rehabilitasi Jalur KA	Km	607,790	424,322	74,249	2,644	78,512	1.187,52

2.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada periode tahun 2020 – 2024, capaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk tahun 2020 dan tahun 2024 berdasarkan Capaian Kinerja pada Triwulan IV tahun 2024 dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 2.6. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DALAM RENSTRA 2020-2024	SATUAN	Target 2023	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA THN 2023	SATUAN	Target					Realisasi				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi Yang Terhubung Jalur Kereta Api	Lokasi	41	Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah	Rasio	0,409	0,416	0,436	0,450	0,46	0,409	0,416	0,463	0,436	0,46
Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	%	89,94	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	%	82,84	86,99	87,1	91,37	94	82,83	90,34	91,37	92,87	95,02



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DALAM RENSTRA 2020-2024	SATUAN	Target 2023	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA THN 2023	SATUAN	Target					Realisasi				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi Perkeretaapi an	Unit	-	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	57,67	59,33	58,11	64,43	64,43	57,67	59,33	58,11	64,04	64,43
Jumlah Peningkatan Gardu Traksi Dan Laa Perkeretaapi an	Unit	-												



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DALAM RENSTRA 2020-2024	SATUAN	Target 2023	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA THN 2023	SATUAN	Target					Realisasi				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapi an	Nilai	-	-	-	3,6	3,7	-	-	-	3,7	3,88
Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapi an Milik Negara	Km' sp	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DALAM RENSTRA 2020-2024	SATUAN	Target 2023	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	SATUAN	Target					Realisasi				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapi an	Serti fikat	200	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapi an	%	68.03	77.39	84.23	94.60	100	69,59	76,59	87	100,84	100,79
Jumlah Rumusan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapi an	Dok ume n	10	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapi an	%	54,17	66,67	82,43	89,19	100	54,17	66,67	79,73	85,14	105,26
Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan Dibidang Prasarana Perkeretaapi an Yang Tepat Waktu	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DALAM RENSTRA 2020-2024	SATUAN	Target 2023	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA THN 2023	SATUAN	Target					Realisasi				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapi an	Nilai	-	-	-	81	84	-	-	-	83,95	82,10
-	-	-	Tingkat Maturitas (SPIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapi an	Level	-	-	-	3	3	-	-	-	3	3



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DALAM RENSTRA 2020-2024	SATUAN	Target 2023	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA THN 2023	SATUAN	Target					Realisasi				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyerapan Anggaran	%	100	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapi an	%	94,34	99,00	99,93	89,35	91,76	99,34	99,00	99,96	89, 35	95,41
Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapi an	Rp	2,1 Milyar	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapi an	%	100	100	100	100	99,02	105,7	216,86	58,37	55,23	99,02



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

DJKA
Membangun
Perkeretaapian
Nasional

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

 **ditpraska**

 **djka.dephub.go.id/prasaranaka**





RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

3.1. VISI MISI DAN TUJUAN

3.1.1. VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam menetapkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 sesuai lingkup tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Peraturan Presiden No. 173 Tahun 2024 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian;
- b. Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan nasional dan transportasi perkeretaapian sesuai muatan pokok Visi Indonesia Emas 2045 yang termuat RPJPN 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029. Untuk itu mengakomodasi visi Pembangunan Nasional dalam visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 melalui frasa “Menuju Indonesia Maju”;
- c. Pengakomodasi visi Kementerian Perhubungan dalam visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 melalui frasa “Transportasi Indonesia Maju”, yang mana sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan transportasi bidang perkeretaapian;
- d. Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai unit kerja yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian, tentunya dalam merencanakan pembangunan perkeretaapian berpijak pada dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Nasional Tahun 2030.



Di dalam RIP Nasional tersebut dijelaskan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan perkeretaapian sampai tahun 2030. Pengakomodasi visi RIP Nasional 2030 dalam visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 melalui frasa “Perkeretaapian Maju” meliputi: berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan”.

Berdasarkan pertimbangan di atas ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029: “Perkeretaapian Maju dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan transportasi perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar disusun Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam mendukung Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2029 ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Menyediakan transportasi perkeretaapian yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
- b. Mewujudkan dukungan transportasi perkeretaapian terhadap ketahanan dan kemandirian nasional yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi perkeretaapian yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
- d. Memperkuat kualitas SDM transportasi perkeretaapian dan penerapan kebijakan transportasi perkeretaapian yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
- e. Memperkuat konektivitas transportasi perkeretaapian nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;



- f. Membangun transportasi perkeretaapian perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
- g. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional;
- h. Mewujudkan transportasi perkeretaapian ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

3.1.2. VISI DAN MISI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Dalam menetapkan Visi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 sesuai lingkup tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perkeretaapian dalam Peraturan Presiden No. 173 Tahun 2024 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian;
- b. Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan nasional dan transportasi perkeretaapian sesuai muatan pokok Visi Indonesia Emas 2045 yang termuat RPJPN 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029. Untuk itu mengakomodasi visi Pembangunan Nasional dalam visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 melalui frasa “Menuju Indonesia Maju”;
- c. Pengakomodasi visi Kementerian Perhubungan dalam visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 melalui frasa “Transportasi Indonesia Maju”, yang mana sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggaraan transportasi bidang perkeretaapian;



- d. Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai unit kerja yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian, tentunya dalam merencanakan pembangunan perkeretaapian berpijak pada dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Nasional Tahun 2030. Di dalam RIP Nasional tersebut dijelaskan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan perkeretaapian sampai tahun 2030. Pengakomodasi visi RIP Nasional 2030 dalam visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 melalui frasa “Perkeretaapian Maju” meliputi: berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan”.

Berdasarkan pertimbangan di atas ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029: “Prasarana Perkeretaapian Maju dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam mewujudkan Visi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan transportasi perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar disusun Misi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam mendukung Prasarana Perkeretaapian Maju Menuju Indonesia Emas 2029 ditetapkan Misi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029. Misi Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 dapat dikategorikan menjadi 2 misi utama yaitu:

1. Mewujudkan konektivitas, pelayanan dan keselamatan prasarana perkeretaapian yang maju (merupakan misi eksternal yang terkandung di dalam Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian poin 1, 2, 3, 5, 6 dan 8 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi



Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam menyediakan pelayanan transportasi perkeretaapian yang maju) dan;

2. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik prasarana perkeretaapian yang maju (merupakan misi internal yang terkandung di dalam Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian poin 4 dan 7 yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola birokrasi dan layanan publik dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian).

3.1.3. TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 tidak terlepas dari penurunan/cascading tujuan dari Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan memperhatikan visi yang sudah ditetapkan.

Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025-2045;
2. Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3.1.4. TUJUAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan memperhatikan visi yang sudah ditetapkan. Tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 sebagai berikut:



- T.1 Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kebutuhan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan berkelanjutan, dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program infrastruktur konektivitas Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
- T.2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berintegritas dan adaptif dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program Dukungan Manajemen Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA

3.2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Sesuai arahan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkeretaapian dalam RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029, dilakukan inventarisasi arah kebijakan dan strategi utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian antara lain:

1. Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota

Jaringan kereta api dalam pengembangan jaringan transportasi antar kota dalam pulau berperan sebagai moda utama jarak jauh.

Jaringan utama (*trunk line*) adalah jaringan jalur kereta api nasional sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dengan jaringan pengumpan (*feeder line*) adalah jaringan jalur kereta api provinsi/kabupaten/kota sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi/Kabupaten/Kota Jaringan kereta api dapat dikembangkan jaringan menuju simpul bandara dan pelabuhan. Strategi implementasi yang dilakukan antara lain:

- a. Menyiapkan dokumen perencanaan (*readiness criteria*) pembangunan jalur kereta api antar kota;



- Melanjutkan pembangunan jalur kereta Trans Sumatera dalam rangka menyambungkan jaringan jalur kereta api Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian utara dalam rangka meningkatkan konektivitas kawasan di Pulau Sumatera;
- b. Melanjutkan pengembangan kereta api cepat (high speed train) Jakarta- Surabaya untuk peningkatan efisiensi integrasi ekonomi dan pengembangan kawasan pusat kegiatan;
 - c. Pengembangan dan penataan stasiun kereta api kelas besar sebagai pusat hub dan stasiun kereta api kelas sedang/kecil sebagai spoke yang terintegrasi dengan simpul bandara dan Pelabuhan;
 - d. Reaktivasi jalur kereta api dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel maupun berbasis otonom terintegrasi dan berkelanjutan, melalui strategi:
- a. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan di yang diintegrasikan dengan pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD);
 - b. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan dengan teknologi sesuai dengan kondisi wilayah dan kemampuan fiskal daerah, antara lain kereta api massal, kereta api ringan, kereta gantung;
 - c. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan berbasis otonom dengan memanfaatkan teknologi;
 - d. Pengembangan simpul dan jaringan pendukung kawasan Ibukota Negara (IKN).



3. Pengembangan Kereta Api Angkutan Barang Pendukung Logistik
 - a. Pengembangan jaringan kereta api barang di Sumatera bagian selatan dan Lampung dalam rangka mendukung efisiensi distribusi angkutan barang komoditas utama dan logistik;
 - b. Pengembangan jaringan kereta api barang di Kalimantan dan Sulawesi dalam rangka mendukung efisiensi distribusi angkutan barang komoditas utama dan logistik;
 - c. Pengembangan jaringan kereta api menuju kawasan ekonomi/strategis/pusat komoditas utama dan simpul outlet distribusi angkutan barang komoditas utama dalam rangka penguatan sistem distribusi koridor utama mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi/strategis dengan pelabuhan/bandara) dan perluasan jaringan kereta api untuk efisiensi logistik;
 - d. Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas jalur rel ganda/double track untuk logistik angkutan khusus;
 - e. Pengembangan stasiun barang/dry port dalam mendistribusikan logistik barang.
4. Pengembangan Jaringan Kereta Api Di Ibukota Negara Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Maupun Berbasis Otonom Terintegrasi Dan Berkelanjutan, Melalui Strategi:
 - a. Pengembangan jaringan kereta api dalam mendukung konektivitas Ibukota Negara dengan kawasan pusat kegiatan di Kalimantan;
 - b. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis otonom dan berbasis teknologi lainnya yang ramah lingkungan dalam rangka mendukung konektivitas di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah dan kawasan di dalam Ibukota Negara;
 - c. Pengembangan simpul transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.



Arah Kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana pada tabel dibawah ini menyampaikan rekomendasi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk setiap Sasaran Program (SP) berdasarkan hasil analisis yang memetakan perkembangan isu dan lingkungan strategis menjadi elemen kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantang yang perlu diantisipasi oleh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui pelaksanaan sejumlah inisiatif strategis (strategi dan kebijakan).

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan serta mendorong terwujudnya tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan dengan arah kebijakan, yakni:
 - a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jaringan kereta api antar kota, perkotaan, logistik dan reaktivitas jalur kereta api mati;
 - b) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting, peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api, peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian, peningkatan subsidi pelayanan kereta api, peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender



- dan peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api;
- c) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api, peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian, peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian, peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian, pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang dan peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang;
2. Tujuan 3 (T.3) Terwujudnya kebijakan transportasi perkeretaapian yang berkualitas dengan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas kebijakan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan kualitas perencanaan kebijakan transportasi perkeretaapian yang relevan dengan perkembangan isu strategis dan lingkungan strategis serta peningkatan efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatan kebijakan di bidang perkeretaapian;
3. Tujuan 4 (T.4) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berkualitas dengan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Peningkatan manajemen penyelenggaraan transportasi perkeretaapian, peningkatan pengelolaan system informasi dan teknologi transportasi perkeretaapian, peningkatan pengelolaan komunikasi dan informasi publik transportasi perkeretaapian, peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian, peningkatan pengelolaan organisasi dan SDM transportasi perkeretaapian dan peningkatan pengelolaan



perencanaan, keuangan, BMN dan umum transportasi
perkeretaapian.



Tabel 3.1. Sasaran Program, Arah Kebijakan, dan Strategi Implementasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	AK1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jaringan kereta api cepat (<i>high speed</i>) • Pembangunan jaringan kereta api <i>medium speed</i> • Pembangunan jembatan/terowongan • Pembangunan/peningkatan fasilitas operasional (persinyalan, telekomunikasi, instalasi listrik)
	AK2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api perkotaan • Peningkatan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur ganda • Pembangunan jalur kereta api massal cepat • Pembangunan jalur kereta api ringan • Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis rel dan otonom di perkotaan Ibukota Negara (IKN) • Pembangunan/pengembangan stasiun terintegrasi • Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA)
	AK3. Peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengintegrasian jaringan jalan rel Pulau Sumatera (Trans Sumatera Railways) untuk mendukung peningkatan angkutan komoditas utama dan efisiensi logistik barang • Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemafaatan kapasitas jalur rel ganda/<i>double track</i> untuk logistik angkutan khusus • Pengembangan stasiun barang/<i>dry port</i> dalam mendistribusikan logistik barang • Pengembangan jaringan kereta api komoditas utama di Pulau Kalimantan



Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) reaktivasi jalur kereta api • Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati • Penyediaan prasarana stasiun, fasilitas operasi
SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK5 Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalur ganda kereta api/<i>double track</i> di Jawa dan Sumatera • Peningkatan elektrifikasi jalur kereta api • Peningkatan/penataan stasiun kereta api • Peningkatan/penggantian fasilitas operasi (sistem persinyalan, telekomunikasi, listrik) • Skema pengadaan dan pengelolaan sarana kereta api yang berkelanjutan
	AK6 Peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan persinyalan mekanik ke elektrik • Penambahan interlocking sistem persinyalan • Pembangunan dan peningkatan sistem telekomunikasi analog ke digital • Pengembangan aplikasi kinerja prasarana, sarana dan operasional perjalanan kereta api • Pengembangan aplikasi pengawasan lalu lintas kereta api • Monitoring dan evaluasi kinerja prasarana, sarana dan operasional perjalanan kereta api
	AK7 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja prasarana, sarana angkutan kereta api • Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan angkutan kereta api antarkota dan perkotaan • Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan • Pengembangan norma/standar/pedoman/manual pelayanan kereta api perkeretaapian



Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	AK8 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan kereta api	<ul style="list-style-type: none">• Skema pengadaan sarana kereta api perintis• Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja layanan PSO dan angkutan perintis
	AK9 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus• Peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi berkebutuhan khusus• Penyediaan kursi prioritas di kereta dan stasiun kereta api• Penyediaan kereta khusus wanita
	AK10 Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu• Penyediaan park and ride di stasiun kereta api• Penyediaan fasilitas non-motorized (pejalan kaki, sepeda) dan berkebutuhan khusus di stasiun kereta api• Penyediaan fasilitas integrasi antarmoda di stasiun kereta api
SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	AK11 Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian• Peningkatan pelaksanaan self-assessment keselamatan perkeretaapian• Peningkatan kinerja monitoring, evaluasi, inspeksi dan audit penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian• Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana perkeretaapian• Peningkatan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan perkeretaapian



Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	AK12 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan perawatan sarana perkeretaapian• Peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian• Peningkatan pengujian sarana perkeretaapian• Peningkatan pengujian prasarana perkeretaapian• Keberlanjutan skema IMO dan TAC
	AK13 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian• Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian• Pemenuhan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian• Pemenuhan peralatan perawatan sarana perkeretaapian• Pengembangan workshop laboratorium dan simulator• Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian
	AK14 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian• Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian• Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan prasarana perkeretaapian• Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian
	AK15 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian• Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian• Peningkatan sertifikasi perawatan sarana perkeretaapian



Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	AK16 Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian• Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan)• Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)
	AK17 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/early warning system dll)• Penyediaan petugas jaga dan pos jaga• Potensi penutupan perlintasan sebidang liar• Peningkatan perawatan perlintasan sebidang• Pembangunan perlintasan tidak sebidang
	AK18 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan• Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)



Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP4 Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bidang perkeretaapian	AK19 Peningkatan kualitas perencanaan di bidang perkeretaapian (rencana pengembangan, rencana teknis, rencana operasional)	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan relevansi perencanaan yang sudah dihasilkan• Peningkatan efektivitas tindak lanjut perencanaan yang sudah dihasilkan
	AK20 Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatan kebijakan di bidang perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kinerja pelaksanaan monitoring, evaluasi dan kendali mutu implementasi kebijakan• Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi terhadap implementasi kebijakan
SP5 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK21 Peningkatan manajemen penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan sistem e-performance dalam penilaian kinerja• Penguatan penerapan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	AK22 Peningkatan pengelolaan sistem informasi dan teknologi transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi administrasi dan teknis di setiap direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian• Pengintegrasian sistem dan pengelolaan database/big data Direktorat Jenderal Perkeretaapian



Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	AK23 Peningkatan pengelolaan komunikasi dan informasi publik transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan layanan publikasi kepubstakaan• Peningkatan layanan kehumasan dan hubungan antar lembaga• Peningkatan pelaksanaan kerjasama luar negeri• Peningkatan publikasi dan edukasi public tentang penyelenggaraan perkeretaapian• Peningkatan pengelolaah berita dan pelayanan informasi dan dokumentasi
	AK24 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan• Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	AK25 Peningkatan pengelolaan organisasi dan SDM transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian• Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian• Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian• Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan• Pengelolaan kegiatan konseling pegawai• Penerapan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian• Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian• Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian.• Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital• Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian• Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian



Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	AK26 Peningkatan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan umum transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara terintegrasi• Penyusunan review dan penyempurnaan dokumen perencanaan secara berkelanjutan• Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di lingkungan DJKA• Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran (e-monitoring) di lingkungan DJKA• Peningkatan penatausahaan serta kualitas pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan DJKA



3.2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pencapaian yang harus terlaksana dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaan pencapaian strategi Unit Kerja, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menjadi salah satu pelaksana arah kebijakan dan strategi pencapaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Tabel berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2. Tabel Kesesuaian Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jendral Perkeretaapian dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

NO	SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	AK1 Peningkatan Jaringan Kereta Api Antar Kota Sesuai RIP Nasional	SK 1 Meningkatkan Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya konektivitas prasarana perkeretaapian, dilaksanakan dengan strategi: 1. Jasa Konsultansi Penyusunan Survey Invetigasi Desain/Basic Engineering Design dan Detail Engineering Design yang mendukung konektifitas; 2. Pembangunan prasarana perkeretaapian.
		AK 2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan		
		AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati		



NO	SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	AK 6 Peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api	SK 2 Meningkatkan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	<p>Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan perkeretaapian, dilaksanakan dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengukuran kualitas jalur rel KA menggunakan hasil pengukuran kereta api ukur;2. Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana perkeretaapian;3. Monitoring dan evaluasi peningkatan prasarana perkeretaapian;4. Bimbingan Teknis bidang Prasarana Perkeretaapian;5. Jasa Konsultansi Penyusunan Basic Engineering Design dan Detail Engineering Design prasarana perkeretaapian yang mendukung pelayanan;6. Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan;7. Pelayanan bidang Prasarana Perkeretaapian.
		AK 7 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian		



NO	SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	AK 15 Peningkatan Sertifikasi Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	SK 3 Meningkatkan Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	<p>Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya keandalan prasarana mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian, dilaksanakan dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian;2. Peningkatan sertifikasi sistem dan komponen peralatan prasarana perkeretaapian;3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.



NO	SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<div>AK21 Peningkatan manajemen penyelenggaraan transportasi perkeretaapian</div> <div>AK26 Peningkatan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan umum transportasi perkeretaapian</div>	SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<p>Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dilaksanakan dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2. Evaluasi Penyelenggaraan AKIP3. Penyelenggaraan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian4. Evaluasi Manajemen Risiko5. Penyusunan review dan penyempurnaan dokumen perencanaan secara berkelanjutan6. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di lingkungan Ditpraska7. Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran (e-monitoring) di lingkungan Ditpraska



NO	SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
				<p>8. Peningkatan penatausahaan serta kualitas pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan Ditpraska</p> <p>9. Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian</p> <p>10. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian</p> <p>11. Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis</p> <p>12. Peningkatan Sumberdaya Kerasipan</p> <p>13. Evaluasi Kearsipan</p>



3.3. TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2025-2029. Hal tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan maupun pencapaian kegiatan. Rumusan indikator tersebut tetap memperhatikan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2025-2029 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2020-2024, telah ditetapkan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sasaran untuk periode Renstra 2025- 2029 sebagaimana disampaikan berikut:

Tabel 3.3. Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2025-2029

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	70,000	70,000	80,000	90,000	100,000
	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian		Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian		71,429	76,190	100,000	100,000	100,000



SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SA TU AN	TARGET RENSTRA				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK 3		IKK 3 Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	94,000	95,000	96,000	97,000	98,000
		IKK 4 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal	%	65,270	65,270	66,110	66,110	66,110
		IKK 5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890
	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK 6 Persentase Pemenuhan Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	15,295	41,848	69,623	81,678	100,000
		IKK 7 Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	91,358	92,593	96,296	98,765	100,000



SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SA TU AN	TARGET RENSTRA				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK 4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IK K 8 Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,200	83,950	84,900	85,350	85,350
		IK K 9 Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15,000	17,000	19,000	21,000	23,000
		IK K 10 Nilai Kerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,760	83,000	85,000	87,000	90,000
		IK K 11 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		IK K 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	78,560	78,560	80,156	81,867	83,033



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

DJKA
Membangun
Perkeretaapian
Nasional

TARGET KINERJA TAHUNAN

 **ditpraska**

 **djka.dephub.go.id/prasaranaka**





TARGET KINERJA TAHUNAN

4.1. TARGET INDIKATOR KINERJA/PROGRAM RENCANA KINERJA 2026

Kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Adapun tugas dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian Rencana Target Kinerja dan Anggaran untuk Tahun 2026 :

Tabel 4.1. Target dan Pendanaan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		TARGET	BIAYA
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	70,000	75.193.555.000
JUMLAH			75.193.555.000

Tabel 4.2. Target dan Pendanaan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		TARGET	BIAYA
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	76,190	82.550.000.000



Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	95,000	7.566.151.000
Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	%	65,270	10.049.113.000
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,890	250.000.000
JUMLAH			100.405.264.000

Tabel 4.3. Target dan Pendanaan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		TARGET	BIAYA
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	41,848	521.357.422.000
Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	92,593	16.956.879.000
JUMLAH			538.314.301.000

Tabel 4.4. Target dan Pendanaan Sasaran Kegiatan Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		TARGET	BIAYA
Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,950	2.490.549.000
Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	17,000	1.424.614.000
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,000	42.449.647.000
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	100,000	1.160.000.000



Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	78,560	1.647.511.000
JUMLAH			49.172.321.000

Detail kesesuaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta target kegiatan terdapat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

DJKA
Membangun
Perkeretaapian
Nasional

PENUTUP

 **ditpraska**

 **djka.dephub.go.id/prasaranaka**





PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tersebut dapat direviu dan dilakukan penyesuaian.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan dibidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2026 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**



LAMPIRAN





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	70,000
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	76,190
		Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	95,000
		Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal	%	65,270
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,890
3	Meningkatnya Kehandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	41,848
		Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	%	92,593
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,950
		Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	17,000
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	78,560

Jakarta, 30 Juni 2025

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN



Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T., QGIA.
NIP 196507031991032001